SEJARAH PUBLIK SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM HISTORIOGRAFI INDONESIA

Fuadil Fikri[1], Etmi Hardi[2], Rahmuliani Firhriah[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : fuadilfikri785@gmail.com

ABSTRACT

Public history has received increasing attention in the development of modern historiography as it offers an approach that positions society as an essential participant in the production and interpretation of history. This study aims to examine the development of public history as a new paradigm in Indonesian historiography by analyzing its theoretical foundations, methodological challenges, and implications for historical consciousness in Indonesian society. Employing a qualitative approach through systematic literature review and critical discourse analysis, this research traces the evolution of public history in Indonesia from the New Order era to the post-Reformasi digital period. The findings indicate that public history in Indonesia has developed through three major phases: the phase of state-dominated narratives (1966-1998), the phase of deconstructive transition (1998-2010), and the phase of participatory pluralism (2010-present). The advancement of digital technology and community-based archives have promoted democratization of history, yet also introduced critical challenges including historical disinformation, the academic-practitioner divide, and unequal digital access. This study proposes a conceptual framework built upon four core principles: epistemic inclusivity, methodological reflexivity, community engagement, and contemporary relevance. The findings carry important implications for history education curricula, national identity, and collective memory management in Indonesia's pluralistic and democratic society.

Keywords : *Collective Memory, Digital History, Historiography, Indonesia, Paradigm, Public History.*

ABSTRAK

Sejarah publik (public history) semakin mendapat perhatian dalam perkembangan historiografi modern karena menghadirkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses produksi dan pemaknaan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sejarah publik sebagai paradigma baru dalam historiografi Indonesia dengan menelaah landasan teoritis, tantangan metodologis, serta implikasinya terhadap kesadaran sejarah masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui systematic literature review dan analisis wacana kritis untuk menelusuri perkembangan sejarah publik di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era pasca-Reformasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah publik di Indonesia berkembang melalui tiga fase utama: fase dominasi narasi negara (1966-1998), fase dekonstruksi transisional (1998-2010), dan fase pluralisme partisipatif (2010-sekarang). Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang demokratisasi sejarah sekaligus tantangan baru berupa disinformasi historis, kesenjangan akademisi-praktisi, dan ketimpangan akses digital. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual berbasis empat prinsip: inklusivitas epistemik, refleksivitas metodologis, keterlibatan komunitas, dan relevansi kontemporer. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kurikulum pendidikan sejarah, penguatan identitas nasional, serta pengelolaan memori kolektif dalam masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis.

Kata Kunci : *Historiografi, Indonesia, Memori Kolektif, Paradigma, Sejarah Digital, Sejarah Publik.*

PENDAHULUAN

Sejarah publik (*public history*) kini menjadi salah satu kecenderungan penting dalam perkembangan historiografi modern. Jika historiografi akademik selama ini lebih banyak berkembang dalam lingkungan perguruan tinggi dan disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, sejarah publik berupaya membawa pengetahuan sejarah ke ruang yang lebih dekat dengan masyarakat. Penyebaran sejarah dilakukan melalui berbagai sarana, seperti museum, film dokumenter, situs warisan budaya, media digital, serta aktivitas komunitas yang berkaitan dengan sejarah (Cauvin, 2022). Seiring perkembangannya, sejarah publik telah memperoleh posisi yang semakin kuat sebagai bidang kajian tersendiri, yang ditandai oleh lahirnya berbagai program pendidikan, organisasi profesi, dan jurnal ilmiah yang secara khusus membahas isu-isu sejarah publik (Santhalia & Kustiani, 2023).

Di Indonesia, perhatian terhadap sejarah publik masih belum berkembang secara optimal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal, Indonesia memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan kompleks, mulai dari pengalaman kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, konflik politik dan sosial, hingga berbagai perubahan yang terjadi pada masa Reformasi. Kekayaan pengalaman historis tersebut menunjukkan perlunya pendekatan historiografi yang tidak hanya berorientasi pada kalangan akademik, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat luas serta mengakomodasi beragam perspektif yang hidup dalam masyarakat (Leksana, 2021). Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat masyarakat Indonesia memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman sejarah yang beragam (Burhanudin, 2022).

Pada era Orde Baru (1966–1998), penulisan sejarah nasional cenderung berada di bawah pengaruh kebijakan negara yang memanfaatkan sejarah sebagai alat pembentukan identitas nasional dan penguatan legitimasi kekuasaan. Akibatnya, narasi sejarah yang berkembang lebih bersifat tunggal dan disebarluaskan melalui lembaga pendidikan maupun media resmi pemerintah (Roosa, 2021). Setelah Reformasi 1998, terbukanya ruang demokrasi memungkinkan munculnya berbagai interpretasi dan narasi alternatif yang sebelumnya kurang memperoleh ruang dalam wacana publik. Perkembangan tersebut semakin diperkuat oleh hadirnya media digital yang mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi sejarah (Santhalia & Kustiani, 2023).

Perkembangan media kontemporer juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara sejarah yang diproduksi oleh akademisi dan sejarah yang dikonsumsi masyarakat umum. Karya-karya historiografi akademik sering kali menggunakan konsep serta bahasa yang relatif kompleks sehingga kurang mudah dipahami oleh publik luas (Wijaya, 2023). Sebaliknya, berbagai konten sejarah yang beredar melalui media sosial, kanal YouTube, maupun podcast lebih mudah diterima oleh masyarakat karena disajikan secara populer, meskipun tidak selalu didukung oleh metodologi penelitian sejarah yang memadai (Sulasman & Supardan, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sejarah publik memiliki peran yang semakin penting dalam menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi sejarah. Melalui pendekatan ini, pengetahuan sejarah dapat disampaikan secara lebih komunikatif, mudah diakses, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sejarah publik dalam historiografi Indonesia, menganalisis berbagai tantangan epistemologis dan metodologis yang dihadapinya, serta merumuskan kerangka konseptual sejarah publik yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.

Kajian Teoretis

Definisi dan Genealogi Sejarah Publik

Dalam perkembangannya, sejarah publik telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat sebagai salah satu bidang kajian historiografi kontemporer. Menurut Cauvin (2022), sejarah publik merupakan praktik kesejarahan yang berorientasi pada penyampaian dan interaksi pengetahuan sejarah kepada masyarakat di luar lingkungan akademik melalui berbagai media, ruang publik, dan konteks sosial, termasuk ruang digital yang semakin berpengaruh dalam kehidupan modern. Definisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman awal sejarah publik yang lebih berfokus pada lembaga-lembaga tertentu menuju pendekatan yang lebih terbuka, interaktif, dan partisipatif.

Lebih lanjut, De Groot (2022) memandang sejarah publik tidak hanya sebagai persoalan lokasi atau ruang tempat sejarah disajikan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukan, penyebaran, serta perundingan makna sejarah di tengah masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi sejarah semata, melainkan sebagai aktor yang turut berperan dalam membangun dan menafsirkan memori kolektif mengenai masa lalu. Gagasan tersebut menjadi relevan dalam konteks Indonesia, terutama karena semakin banyak komunitas adat, kelompok minoritas, dan masyarakat lokal yang berupaya menghadirkan kembali pengalaman sejarah mereka ke dalam ruang publik yang lebih luas (Leksana, 2021).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong lahirnya konsep *digital public history*. Santhalia dan Kustiani (2023) menjelaskan bahwa bidang ini mengintegrasikan metode penelitian sejarah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses dan partisipasi masyarakat terhadap sejarah. Dengan demikian, sejarah publik digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi sejarah melalui internet, tetapi juga membuka peluang terciptanya bentuk interaksi baru antara sejarawan, masyarakat, dan sumber-sumber sejarah. Fenomena ini sangat penting bagi Indonesia mengingat tingginya jumlah pengguna internet yang menjadikan ruang digital sebagai salah satu arena utama dalam produksi, penyebaran, dan konsumsi pengetahuan sejarah pada era kontemporer.

Kerangka Teoretis: Memori Kolektif dan Historiografi Kritis

Kajian sejarah publik memiliki keterkaitan yang erat dengan studi memori (*memory studies*) karena sama-sama menyoroti cara masyarakat memahami, mempertahankan, dan merekonstruksi ingatan tentang masa lalu. Dalam pengembangannya, Wertsch (2021) menegaskan bahwa teknologi memegang peranan penting dalam proses pembentukan memori kolektif. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ingatan, tetapi juga berkontribusi dalam mengubah cara suatu masyarakat menafsirkan pengalaman historisnya. Dalam konteks Indonesia, perkembangan arsip digital, film dokumenter berbasis internet, dan media sosial telah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk mendiskusikan serta membentuk kembali pemahaman atas berbagai peristiwa sejarah (Wijaya, 2023). Melalui media tersebut, berbagai memori mengenai perjuangan kemerdekaan, peristiwa 1965, maupun konflik sosial pada era pasca-Reformasi terus diperdebatkan dan dimaknai ulang oleh beragam kelompok masyarakat (Roosa, 2021).

Burhanudin (2022) menjelaskan bahwa transformasi *lieux de mémoire* atau tempat-tempat memori menjadi salah satu fenomena penting dalam perkembangan sejarah publik di Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru. Menurutnya, sejumlah museum nasional mulai bergeser dari fungsi tradisional sebagai penyampai narasi resmi negara menuju ruang yang memberikan peluang lebih besar bagi partisipasi dan dialog publik. Meskipun demikian, perubahan tersebut masih

menghadapi berbagai kendala sehingga penerapannya belum berlangsung secara merata di seluruh institusi. Keadaan ini menunjukkan adanya perdebatan berkelanjutan antara kepentingan negara dalam membentuk narasi sejarah dan tuntutan masyarakat akan ruang sejarah yang lebih inklusif.

Sementara itu, Stoler (2021) melalui pendekatan postkolonial berpendapat bahwa arsip kolonial tidak dapat diperlakukan sebagai sumber sejarah yang sepenuhnya objektif. Arsip tersebut lahir dalam konteks relasi kekuasaan tertentu sehingga turut menentukan peristiwa dan kelompok mana yang memperoleh ruang dalam ingatan kolektif. Oleh sebab itu, sejarah publik perlu mendorong pembacaan kritis terhadap sumber-sumber kolonial sekaligus memberikan tempat bagi suara-suara yang selama ini kurang terwakili dalam historiografi arus utama.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Roosa (2021) mengenai Tragedi 1965. Ia menunjukkan bahwa pengalaman para korban yang selama bertahun-tahun tersisih dari narasi resmi dapat dihadirkan kembali melalui pendekatan sejarah publik yang memanfaatkan sejarah lisan, arsip komunitas, dan kajian kritis terhadap dokumen negara. Melalui pendekatan tersebut, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai rekonstruksi masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk menghadirkan perspektif yang lebih beragam dan inklusif dalam ruang publik.

Paradigma dan Pergeseran Epistemologis dalam Historiografi

Dalam konteks sejarah publik, istilah paradigma mengacu pada perubahan mendasar dalam cara sejarah dipahami, diproduksi, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pergeseran ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa yang berhak membangun narasi sejarah, bagaimana pengetahuan sejarah dikomunikasikan, serta siapa yang menjadi sasaran utama dari penulisan sejarah tersebut. Menurut Wicaksono (2024), penerapan paradigma sejarah publik dalam historiografi Indonesia tidak hanya mencerminkan perubahan pada aspek metode penelitian dan penyajian sejarah, tetapi juga menunjukkan adanya transformasi epistemologis yang mempersoalkan konsep-konsep tradisional mengenai objektivitas, otoritas akademik, serta hubungan antara masa lalu dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Lebih lanjut, de Groot (2022) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang membedakan paradigma sejarah publik dari historiografi akademik konvensional. Pertama, sejarah publik menyadari bahwa produksi pengetahuan sejarah tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konteks sosial maupun relasi kekuasaan yang melingkupinya. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penyebaran sejarah dipandang sebagai unsur yang dapat memperkaya kajian sejarah, bukan sebagai ancaman terhadap validitas ilmiah. Ketiga, sejarah publik menempatkan relevansi sosial sebagai salah satu aspek penting dalam penilaian karya sejarah. Dengan demikian, nilai suatu kajian sejarah tidak hanya ditentukan oleh ketepatan metodologisnya, tetapi juga oleh kontribusinya terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Karakteristik-karakteristik tersebut menjadi dasar yang menegaskan posisi sejarah publik sebagai paradigma yang memiliki landasan epistemologis tersendiri.

Dalam konteks pendidikan sejarah di Indonesia, Sulasman dan Supardan (2021) menilai bahwa pergeseran paradigma tersebut memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Menurut mereka, paradigma sejarah publik menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengembangkan kompetensi sejarah peserta didik karena tidak hanya menekankan penguasaan fakta-fakta sejarah, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, interpretatif, dan partisipatif dalam memahami berbagai persoalan historis yang berkembang di masyarakat.

Kajian Terdahulu

Berbagai penelitian yang diterbitkan dalam periode 2021–2024 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian sejarah publik di Indonesia. Penelitian Leksana (2021) menunjukkan bahwa perkembangan komunitas sejarah lokal di era digital telah membuka ruang baru bagi praktik sejarah publik. Melalui pemanfaatan media sosial, berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap publikasi akademik kini dapat berpartisipasi dalam produksi, penyebaran, dan diskusi pengetahuan sejarah secara lebih luas.

Kontribusi penting lainnya diberikan oleh Roosa (2021) melalui kajiannya mengenai Tragedi 1965. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penggabungan sejarah lisan, arsip komunitas, dan kajian kritis terhadap dokumen negara mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peristiwa tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sejarah publik dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghubungkan standar akademik yang ketat dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses rekonstruksi sejarah.

Kajian Burhanudin (2022) berfokus pada perubahan yang terjadi di museum-museum nasional Indonesia setelah Reformasi. Hasil penelitiannya mengungkap adanya dinamika antara peran museum sebagai representasi narasi resmi negara dan tuntutan untuk menjadikannya sebagai ruang publik yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis. Sementara itu, Santhalia dan Kustiani (2023) menyoroti tantangan yang muncul dalam era digital, khususnya terkait penyebaran disinformasi sejarah di media sosial. Penelitian mereka menunjukkan bahwa manipulasi narasi sejarah sering kali dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu dalam konteks kekinian.

Perkembangan terbaru dalam kajian sejarah publik ditunjukkan oleh penelitian Wicaksono (2024) yang membahas potensi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dan realitas virtual (*Virtual Reality* atau VR) dalam praktik sejarah publik di Indonesia. Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut berpeluang menciptakan cara-cara baru yang lebih interaktif dalam menyampaikan dan mengakses pengetahuan sejarah pada masa mendatang.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memperkaya pemahaman mengenai praktik sejarah publik di Indonesia, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek-aspek praktis sejarah publik, seperti komunitas sejarah, museum, media digital, maupun teknologi baru. Namun demikian, upaya untuk merumuskan sejarah publik sebagai sebuah paradigma historiografi yang memiliki landasan konseptual yang utuh, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji sejarah publik tidak hanya sebagai praktik, tetapi juga sebagai paradigma baru dalam historiografi Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Critical Discourse Analysis* (CDA). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan sejarah publik dari sisi konsep, pemikiran, dan pembentukan wacana yang berkembang dalam historiografi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih menekankan pada analisis makna dan interpretasi data daripada pengukuran secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2023). Metode SLR digunakan untuk menelaah

dan memetakan berbagai literatur yang berkaitan dengan sejarah publik secara sistematis, sedangkan CDA digunakan untuk mengkaji bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi pembentukan narasi sejarah dalam berbagai konteks sosial (Fairclough, 2022).

Data penelitian berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya historiografi Indonesia, dokumen kebijakan kurikulum, arsip digital yang dikelola komunitas, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan museum dan situs warisan budaya. Sementara itu, sumber sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, dan berbagai publikasi akademik yang membahas sejarah publik, historiografi Indonesia, serta kajian memori. Untuk menjaga relevansi penelitian, penulis memprioritaskan literatur yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2024. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan 21 referensi yang sesuai dengan fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai basis data akademik, seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan arsip digital nasional serta berbagai dokumentasi yang dipublikasikan oleh komunitas sejarah di Indonesia. Literatur yang dipilih harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu memiliki keterkaitan dengan tema sejarah publik dan historiografi Indonesia, berasal dari sumber akademik yang kredibel, serta diterbitkan dalam periode 2021–2024.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan penelitian. Tahap kedua menyusun gambaran perkembangan sejarah publik di Indonesia berdasarkan periodisasinya. Tahap ketiga menerapkan analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan memengaruhi pembentukan narasi sejarah. Selanjutnya, data yang telah dianalisis disintesis untuk menghasilkan kerangka konseptual mengenai sejarah publik sebagai paradigma historiografi. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang digunakan serta memperhatikan pandangan para ahli yang membahas historiografi Indonesia (Creswell & Poth, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Periodisasi Sejarah Publik di Indonesia

Hasil analisis terhadap perkembangan historiografi dan praktik sejarah publik di Indonesia menunjukkan adanya tiga tahapan utama dalam evolusinya, yang masing-masing mencerminkan konteks sosial, politik, dan teknologi yang berbeda.

Fase Dominasi Narasi Negara (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, pemerintah memegang kendali yang sangat besar dalam membentuk dan menyebarkan pemahaman sejarah kepada masyarakat. Sejarah nasional dikonstruksi melalui narasi yang cenderung tunggal dan seragam sebagai sarana untuk membangun identitas nasional sekaligus memperkuat legitimasi kekuasaan. Narasi tersebut disebarluaskan melalui kurikulum pendidikan yang terstandarisasi, pembangunan monumen, penamaan ruang publik, serta museum yang tidak hanya berfungsi sebagai media pendidikan, tetapi juga sebagai alat penyampaian ideologi negara (Burhanudin, 2022; Roosa, 2021).

Keberadaan Museum Nasional, Monumen Nasional (Monas), Taman Mini Indonesia Indah, serta berbagai museum perjuangan di berbagai daerah menunjukkan bagaimana ruang publik dimanfaatkan untuk menampilkan sejarah sesuai dengan kepentingan politik pemerintah. Berbagai peristiwa sensitif, termasuk Tragedi 1965, direpresentasikan melalui perspektif resmi

negara melalui film, buku pelajaran, dan kegiatan peringatan yang bersifat wajib, sementara pengalaman para korban dan kelompok yang memiliki pandangan berbeda cenderung tidak memperoleh ruang dalam narasi tersebut (Roosa, 2021; Stoler, 2021). Dalam kondisi ini, sejarah publik lebih berfungsi sebagai instrumen negara daripada sebagai ruang yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas.

Fase Dekonstruksi Transisional (1998-2010)

Perubahan politik yang terjadi setelah Reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi munculnya berbagai penafsiran sejarah yang sebelumnya sulit berkembang dalam narasi resmi negara. Pada periode ini, berbagai upaya untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa kekerasan masa lalu semakin meningkat, disertai dengan munculnya lembaga sejarah independen dan berkembangnya kajian sejarah lokal di berbagai daerah (Burhanudin, 2022). Selain itu, pembentukan berbagai komisi kebenaran dan rekonsiliasi menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk memahami dan merefleksikan peristiwa-peristiwa kelam masa lalu secara lebih terbuka.

Namun demikian, proses peninjauan kembali terhadap narasi sejarah resmi tidak selalu didukung oleh pendekatan metodologis yang sama. Leksana (2021) menjelaskan bahwa praktik sejarah publik pada periode ini masih banyak digerakkan oleh aktivis dan kalangan akademisi kritis, sehingga jangkauannya kepada masyarakat luas belum berlangsung secara optimal. Di samping itu, sebagian narasi alternatif yang berkembang masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dan respons terhadap narasi lama, sehingga belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman sejarah yang lebih objektif dan komprehensif. Meskipun demikian, fase ini memiliki arti penting karena menjadi awal terbukanya ruang bagi perkembangan sejarah publik yang lebih partisipatif dan inklusif pada periode selanjutnya.

Fase Pluralisme Partisipatif (2010-Sekarang)

Pada periode ini, perkembangan teknologi digital mengubah cara sejarah diproduksi, disebarkan, dan diakses oleh masyarakat. Berbagai komunitas sejarah lokal mulai berkembang dan memanfaatkan media digital sebagai sarana berbagi pengetahuan sejarah. Kehadiran arsip digital yang dapat diakses secara terbuka juga memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh sumber sejarah secara langsung tanpa terhalang batas-batas institusional seperti sebelumnya (Santhalia & Kustiani, 2023; Wicaksono, 2024).

Wijaya (2023) menunjukkan bahwa popularisasi sejarah Indonesia melalui platform digital mengalami peningkatan yang signifikan. Berbagai kanal YouTube bertema sejarah berhasil menarik jutaan pengikut dan secara konsisten menghadirkan konten mengenai topik-topik sejarah yang sebelumnya dianggap sensitif atau kurang diminati oleh masyarakat umum. Keberadaan komunitas seperti Historia Indonesia dan berbagai komunitas sejarah daerah membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap sejarah cukup tinggi apabila disajikan dalam format yang menarik dan mudah diakses (Sulasman & Supardan, 2021).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) dan realitas virtual (*Virtual Reality* atau VR) mulai diterapkan dalam praktik sejarah publik digital di Indonesia. Wicaksono (2024) menjelaskan bahwa sejumlah museum dan lembaga sejarah telah mengembangkan tur virtual serta pengalaman interaktif yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan peristiwa sejarah secara lebih aktif. Selain itu, pandemi COVID-19 turut mempercepat pemanfaatan teknologi digital karena berbagai lembaga sejarah harus mengembangkan layanan daring untuk mempertahankan keterlibatan publik selama masa pembatasan aktivitas fisik.

Tantangan Epistemologis dan Metodologis

Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, sejarah publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya.

Ketegangan antara Aksesibilitas dan Ketelitian Akademik

Salah satu tantangan utama dalam sejarah publik adalah menjaga keseimbangan antara aksesibilitas informasi bagi masyarakat luas dan tuntutan ketelitian akademik. Penyampaian sejarah kepada publik sering kali memerlukan penggunaan bahasa dan narasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Namun, penyederhanaan tersebut dapat berisiko mengurangi kedalaman analisis serta menghilangkan kompleksitas yang terdapat dalam suatu peristiwa sejarah (De Groot, 2022). Wijaya (2023) menemukan bahwa banyak pengguna konten sejarah digital belum memiliki kemampuan analitis yang memadai untuk menilai kualitas informasi sejarah yang mereka konsumsi, sehingga lebih rentan menerima narasi yang menarik secara emosional tetapi kurang didukung oleh bukti yang kuat.

Politisasi Memori Sejarah

Berbagai aktor sosial dan politik, seperti partai politik, organisasi keagamaan, dan kelompok etnis, berusaha membentuk serta mempertahankan interpretasi sejarah yang sejalan dengan kepentingan dan identitas mereka masing-masing. Akibatnya, ruang publik kerap menjadi tempat berlangsungnya persaingan berbagai narasi sejarah yang saling bertentangan tanpa adanya mekanisme rekonsiliasi yang memadai (Roosa, 2021; Burhanudin, 2022). Santhalia dan Kustiani (2023) menemukan adanya pola disinformasi sejarah yang berkembang secara sistematis di media sosial Indonesia, seperti manipulasi foto dan video sejarah, penyebaran kutipan palsu yang dikaitkan dengan tokoh tertentu, serta penyajian kronologi peristiwa sejarah yang sengaja diubah untuk mendukung kepentingan politik masa kini.

Kesenjangan antara Akademisi dan Praktisi

Hubungan antara akademisi dan praktisi sejarah publik masih belum terjalin secara optimal. Leksana (2021) mencatat bahwa sebagian kalangan akademik menganggap sejarah publik sebagai bentuk penyederhanaan yang berpotensi menurunkan standar keilmuan. Sebaliknya, praktisi sejarah publik sering menilai bahwa dunia akademik terlalu tertutup dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini kurang menguntungkan karena praktik sejarah publik yang ideal memerlukan perpaduan antara analisis akademik yang mendalam dan penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Sulasman dan Supardan (2021) menawarkan model kerja sama yang melibatkan perguruan tinggi, komunitas sejarah, dan lembaga pendidikan secara terstruktur.

Otentisitas dan Verifikasi dalam Era Digital

Perkembangan teknologi digital menciptakan paradoks dalam praktik sejarah publik di Indonesia. Di satu sisi, platform digital memberikan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses, menghasilkan, dan menyebarkan pengetahuan sejarah. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait validitas dan verifikasi informasi sejarah. Wicaksono (2024) menunjukkan bahwa pada era AI generatif, kemampuan untuk menghasilkan konten sejarah palsu yang tampak kredibel meningkat secara signifikan, sehingga menjadi ancaman baru bagi integritas sejarah publik digital. Santhalia dan Kustiani (2023) menegaskan pentingnya pengembangan mekanisme verifikasi berbasis komunitas yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan digital yang terus berkembang.

Aksesibilitas dan Kesenjangan Digital

Meskipun kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai media baru untuk penyebaran pengetahuan sejarah, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sulasman dan Supardan (2021) mencatat bahwa faktor geografis, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masih memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber-sumber sejarah digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah digitalisasi sejarah publik justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara masyarakat perkotaan yang memiliki akses digital yang baik dan masyarakat pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas.

Kerangka Konseptual Sejarah Publik sebagai Paradigma

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual sejarah publik sebagai paradigma dalam historiografi Indonesia yang dibangun atas empat prinsip dasar yang saling berkaitan.

Prinsip pertama adalah inklusivitas epistemik, yaitu pandangan bahwa pengetahuan sejarah tidak hanya dihasilkan oleh sejarawan profesional maupun lembaga akademik. Komunitas lokal, jurnalis, seniman, pegiat budaya, dan masyarakat umum juga dapat berperan dalam menghasilkan pengetahuan sejarah selama tetap berpegang pada prinsip verifikasi dan akuntabilitas ilmiah (Cauvin, 2022). Leksana (2021) menunjukkan bahwa berbagai komunitas sejarah lokal di Indonesia telah berhasil mendokumentasikan serta mempublikasikan aspek-aspek sejarah daerah yang sebelumnya belum terakomodasi dalam narasi sejarah nasional.

Prinsip kedua adalah refleksivitas metodologis yang menekankan kesadaran bahwa setiap representasi sejarah selalu dipengaruhi oleh perspektif, kepentingan, dan konteks tertentu. De Groot (2022) menjelaskan bahwa sejarah tidak dapat dipahami sebagai refleksi yang sepenuhnya netral terhadap masa lalu, melainkan sebagai hasil proses seleksi, interpretasi, dan penyusunan narasi. Oleh sebab itu, pelaku sejarah publik, baik melalui museum, film dokumenter, pameran, maupun media digital, perlu menyadari dan menjelaskan secara terbuka posisi epistemologis yang mereka gunakan dalam membangun narasi sejarah. Stoler (2021) menunjukkan bahwa arsip kolonial yang selama ini dianggap objektif sebenarnya mengandung perspektif dan kepentingan kekuasaan yang perlu dikaji secara kritis.

Prinsip ketiga adalah keterlibatan komunitas (*community engagement*). Dalam prinsip ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi atau objek penelitian, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat aktif dalam penyusunan, penafsiran, dan penyebaran narasi sejarah (Cauvin, 2022; Burhanudin, 2022). Dengan demikian, produksi sejarah menjadi proses kolaboratif yang melibatkan berbagai kelompok dengan pengalaman dan memori sejarah yang beragam. Roosa (2021) menunjukkan bahwa pendekatan sejarah partisipatif yang memberikan ruang bagi kesaksian para penyintas mampu menghasilkan pemahaman sejarah yang lebih kaya dan lebih berkeadilan dibandingkan narasi yang hanya bertumpu pada dokumen resmi.

Prinsip keempat adalah relevansi kontemporer, yaitu kemampuan sejarah publik dalam menghubungkan pengalaman masa lalu dengan persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Wertsch (2021) menyatakan bahwa sejarah akan memiliki makna apabila dapat membantu masyarakat memahami kondisi masa kini sekaligus menghadapi berbagai pilihan pada masa depan. Dalam konteks Indonesia, relevansi kontemporer menuntut sejarah publik untuk mampu membahas isu-isu penting seperti keadilan transisional, hak-hak kelompok minoritas, pembangunan berkelanjutan, dan identitas nasional di tengah arus globalisasi (Sulasman & Supardan, 2021).

Keempat prinsip tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu paradigma yang utuh. Inklusivitas epistemik tanpa refleksivitas metodologis dapat mendorong munculnya relativisme yang berlebihan. Refleksivitas metodologis tanpa keterlibatan komunitas berisiko menghasilkan elitisme akademik. Keterlibatan komunitas tanpa relevansi kontemporer dapat menjadikan sejarah sekadar nostalgia masa lalu. Sementara itu, relevansi kontemporer tanpa inklusivitas epistemik dapat mendorong penggunaan sejarah untuk kepentingan politik jangka pendek. Oleh karena itu, keempat prinsip tersebut perlu diterapkan secara bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain (De Groot, 2022; Wicaksono, 2024).

Implikasi bagi Historiografi dan Pendidikan Sejarah Indonesia

Penerapan sejarah publik sebagai paradigma historiografi memberikan dampak praktis yang cukup besar terhadap pengembangan kurikulum dan pembelajaran sejarah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, pembelajaran sejarah tidak hanya menekankan penguasaan fakta dan urutan peristiwa, tetapi juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis sumber sejarah, memahami berbagai sudut pandang, serta menelaah proses terbentuknya suatu narasi sejarah. Sulasman dan Supardan (2021) menjelaskan bahwa paradigma sejarah publik sejalan dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, partisipasi masyarakat, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis.

Paradigma sejarah publik juga membawa implikasi penting bagi pengelolaan arsip dan museum di Indonesia. Museum dan arsip tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat penyimpanan koleksi maupun dokumen sejarah, tetapi juga sebagai ruang publik yang memungkinkan terjadinya dialog, interpretasi, dan keterlibatan masyarakat dalam memaknai masa lalu (Burhanudin, 2022). Burhanudin (2022) menunjukkan bahwa beberapa museum di Indonesia telah mulai mengembangkan program partisipatif yang memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk terlibat dalam proses kurasi dan interpretasi koleksi, meskipun praktik tersebut masih bersifat terbatas dan belum menunjukkan perubahan paradigma secara menyeluruh.

Dari sudut pandang identitas nasional, paradigma sejarah publik menawarkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap keberagaman sejarah Indonesia. Daripada menyatukan berbagai pengalaman sejarah ke dalam satu narasi yang seragam, sejarah publik justru memandang keragaman tersebut sebagai kekayaan historis yang dapat memperkuat identitas nasional Indonesia (Leksana, 2021; Wertsch, 2021). Wicaksono (2024) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi digital secara tepat dapat menjadi sarana yang efektif untuk menampilkan keberagaman sejarah Indonesia kepada berbagai kelompok masyarakat secara bersamaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sejarah publik memiliki peluang yang besar untuk berkembang sebagai paradigma dalam historiografi Indonesia. Perjalanan historiografi Indonesia, mulai dari dominasi narasi negara pada masa Orde Baru, berlanjut pada fase dekonstruksi pasca-Reformasi, hingga berkembangnya pluralisme partisipatif di era digital, menunjukkan bahwa praktik sejarah publik telah tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Namun, perkembangan tersebut masih belum diiringi oleh penyusunan kerangka paradigmatik yang jelas, sistematis, dan memiliki dasar akademik yang kuat (Leksana, 2021; Burhanudin, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah publik dapat menjadi paradigma yang memperkaya historiografi Indonesia melalui empat prinsip utama, yaitu inklusivitas epistemik,

refleksivitas metodologis, keterlibatan komunitas, dan relevansi kontemporer. Keempat prinsip tersebut diharapkan mampu menjembatani kebutuhan akan ketepatan akademik dengan tuntutan penyajian informasi sejarah yang mudah diakses oleh masyarakat luas (Cauvin, 2022; De Groot, 2022). Dengan demikian, sejarah publik tidak dimaksudkan untuk menggantikan historiografi akademik, melainkan untuk memperluas pendekatan dan cakupan historiografi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin beragam dan terkoneksi secara digital.

Berbagai tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti politisasi memori sejarah, kesenjangan antara akademisi dan praktisi, persoalan autentisitas pada era AI generatif, serta ketimpangan akses digital, tidak dapat dipandang sebagai hambatan yang bersifat tetap. Sebaliknya, tantangan-tantangan tersebut merupakan agenda yang perlu direspons melalui upaya yang terencana dan kolaboratif oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Santhalia & Kustiani, 2023; Wicaksono, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Burhanudin, J. (2022). Museum, memori, dan demokratisasi sejarah pasca-Orde Baru: Studi transformasi museum nasional Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya, 16*(1), 1–22.

Cauvin, T. (2022). *Public history: A textbook of practice* (2nd ed.). Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

De Groot, J. (2022). *Consuming history: Historians and heritage in contemporary popular culture* (3rd ed.). Routledge.

Fairclough, N. (2022). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (3rd ed.). Routledge.

Leksana, G. (2021). Komunitas sejarah lokal dan demokratisasi pengetahuan historis di Indonesia era digital. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 13*(2), 141–158.

Mansyur, S., & Sukardi, I. (2022). Historiografi Indonesia dan tantangan sejarah publik: Antara wacana akademik dan kebutuhan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sejarah, 11*(2), 89–107.

Maulana, R., & Prasetyo, E. (2023). Literasi sejarah digital dan tantangan disinformasi: Studi pada pengguna media sosial generasi Z di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 9*(1), 15–30.

Mulyadi, Y., & Hasan, S. H. (2021). Sejarah publik dan pendidikan sejarah: Relevansi dan tantangan implementasi di Indonesia. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 4*(2), 111–124.

Nisa, A. K., & Wulandari, T. (2022). Arsip komunitas sebagai sumber alternatif dalam sejarah publik Indonesia: Potensi dan keterbatasan. *Jurnal Kearsipan, 17*(1), 44–61.

Roosa, J. (2021). *Buried histories: The anticommunist massacres of 1965–1966 in Indonesia* (2nd ed.). University of Wisconsin Press.

Santhalia, P., & Kustiani, R. (2023). Sejarah digital dan tantangan disinformasi historis di media sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia, 12*(1), 55–72.

Stoler, A. L. (2021). *Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense* (Rev. ed.). Princeton University Press.

Sulasman, & Supardan, D. (2021). Sejarah publik dan pendidikan sejarah dalam Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah, 22*(2), 91–110.

Syarifudin, A., & Herlambang, W. (2022). Memori traumatis dan sejarah publik: Tantangan rekonsiliasi melalui pendekatan historiografi partisipatif di Indonesia. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 27*(1), 23–48.

Wertsch, J. V. (2021). *How nations remember: A narrative approach*. Oxford University Press.

Wicaksono, A. (2024). Teknologi imersif dan kecerdasan buatan dalam sejarah publik digital di Indonesia: Potensi, tantangan, dan agenda riset. *Jurnal Ilmu Sejarah dan Budaya, 5*(1), 1–20.

Wijaya, D. (2023). Popularisasi sejarah Indonesia melalui platform digital: Studi kasus kanal YouTube sejarah dengan jutaan pengikut. *Lembaran Sejarah, 19*(1), 44–63.

Wineburg, S., & McGrew, S. (2021). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Teachers College Record, 121*(11), 1–40.

Yuliati, D., & Purwanto, B. (2022). Warisan sejarah kolonial dan konstruksi identitas nasional: Tinjauan historiografis atas narasi Indonesia pasca-Reformasi. *Jurnal Sejarah, 5*(2), 74–95.

Zuhdi, S., & Pramono, J. (2021). Sejarah lisan sebagai instrumen sejarah publik: Pengalaman dan metodologi pengumpulan memori komunitas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, 7*(1), 1–22.